

**ANALISIS KEMENANGAN PASANGAN TINA-ADO
DALAM PEMILIHAN KEPALA DAERAH (PILKADA) DI KABUPATEN
MAMUJU TAHUN 2020**

Disusun dan diajukan Oleh:

**ILHAMUDDIN
E052182002**



**PROGRAM MAGISTER ILMU POLITIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2022**

TESIS

**ANALISIS KEMENANGAN PASANGAN TINA- ADO
DALAM PEMILIHAN KEPALA DAERAH (PILKADA) DI KABUPATEN
MAMUJU TAHUN 2020**

Disusun dan diajukan Oleh:

**ILHAMUDDIN
E052182002**

**PROGRAM MAGISTER ILMU POLITIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2022**

LEMBAR PENGESAHAN TESIS

ANALISIS KEMENANGAN PASANGAN TINA-ADO
DALAM PEMILIHAN KEPALA DAERAH DI KABUPATEN MAMUJU
TAHUN 2020

Disusun dan diajukan oleh

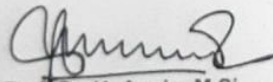
ILHAMUDDIN

E052182002

Telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian yang dibentuk dalam rangka
Penyelesaian Studi Program Magister Program Studi Ilmu Politik Fakultas
Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin
pada tanggal **5 September 2022**
dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

Menyetujui

Pembimbing Utama,



Prof. Dr. H. Armin, M.Si.
Nip. 19651109 199103 1 008

Pembimbing Pendamping,



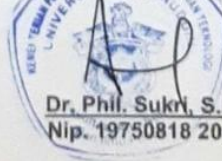
Dr. Ariana Yunus, S.IP., M.Si.
Nip. 19710705 199803 2 002

Ketua Program Studi
Ilmu Politik,



Dr. Ariana Yunus, S.IP., M.Si.
Nip. 19710705 199803 2 002

Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan
Ilmu Politik Universitas Hasanuddin,



Dr. Phil. Sukri, S.IP., M.Si.
Nip. 19750818 200801 1 008

PERNYATAAN KEASLIAN TESIS

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Ilhamuddin

Nomor Pokok : E052182002

Program Studi : Ilmu Politik

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa tesis yang saya tulis ini benar-benar merupakan hasil karya sendiri dan bukan merupakan tulisan atau pemikiran orang lain. Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa sebagian atau keseluruhan tesis ini hasil karya orang lain, saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Makassar, 5 September 2022

Yang menyatakan,



Ilhamuddin

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmaanirrahiim

Assalamualaikum warohmatullahi wabarokatuh

Pertama-tama marilah kita senantiasa memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanawata'ala, pemilik segala sesuatu yang kepadanya kita sebagai hamba akan kembali dengan membawa amalan kita masing-masing selama di dunia. Salam serta salawat kita persembahkan kepada Habibana Wanabiyyana Muhammad Sallallahu 'alaihiwasallam. Nabi sebagai Rahmatallil'aalamiin, sebagai suri tauladan yang baik buat kita semua.

Penulis menyadari bahwa selesainya penulisan tesis ini adalah berkat dukungan dari berbagai pihak, oleh karena itu penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Teristimewa kepada Ayahanda **Zakaria** dan Ibunda **Rasmi** yang telah memberikan cinta dan kasih sayangnya, perhatian dan motivasi, dukungan serta doa yang tulus dalam keberhasilan penulis hingga saat ini
2. Kepada Istriku **Andi Fauziah Ms** tercinta dan Sepasang Malaikat Kecilku **Aurora Alghumaisha** dan **Dzar Alghifary** sebagai penyemangat penulis dalam menyelesaikan tugas akhir
3. **Bapak Prof Dr. Ir. Jamaluddin Jompa, M.Sc.** selaku Rektor Universitas Hasanuddin yang telah memberikan kesempatan

kepada penulis untuk dapat mengenyam pendidikan tinggi pada program Strata-2 (S2) Universitas Hasanuddin

4. **Bapak Dr. Phil. Sukri, S.IP., M.Si.**, selaku Dekan Fakultas Ilmu sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin
5. **Ibu Dr. Ariana Yunus, S.IP.,M.Si.**, selaku ketua Magister Ilmu Politik Pasca Sarjana Universitas Hasanuddin
6. **Bapak Prof. Dr. H. Armin, M.Si.**, selaku Dosen Pembimbing I dan **Ibu Dr. Ariana Yunus, S.IP.,M.Si.**, selaku Dosen Pembimbing II yang telah banyak meluangkan waktunya dalam membimbing, mengarahkan, dan memberikan Ide kepada penulis, sehingga tesi ini dapat diselesaikan
7. Segenap Dosen, pegawai dan seluruh staf program studi Ilmu Politik Sekolah Pasca Sarjana Universitas Hasanuddin yang telah memberikan ilmu pengetahuan dalam bidang politik, motivasi, nasihat dan pelayanannya selama penulis dalam prose perkuliahan
8. Keluarga besar penulis yang selalu memberikan motivasi dalam penyelesaian tesis ini
9. Teman-teman pasca sarjana ilmu politik angkatan 2018 yang telah kebersamai dan membantu dalam penyelesaian tesis ini
10. Kepada informanyang telah membantu penulis dalam mencari dan mengumpulkan data yang dibutuhkan

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan tesis ini banyak kekurangan. Oleh karena itu saran, kritik konstruktif dari semua pihak

sangat penulis harapkan. Semoga segala dukungan dan bantuan semua pihak mendapatkan pahala dari Allah SWT, dan berharap semoga karya ini bisa bermanfaat bagi kita semua, Aamiin.

Makassar, 05 September 2022

Ilhamuddin
E052182002

ABSTRAK

ILHAMUDDIN. **Analisis Kemenangan Pasangan Tina-Ado dalam Pemilihan Kepala Daerah di Kabupaten Mamuju** (dibimbing oleh Armin dan Ariana Yunus).

Penelitian ini bertujuan menganalisis faktor-faktor kemenangan pasangan Tina-Ado dalam pemilihan kepala daerah di Kabupaten Mamuju tahun 2020. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif, yakni mendeskripsikan peristiwa atau kejadian, perilaku atau tindakan seseorang atau keadaan di tempat tertentu secara rinci dan mendalam dalam bentuk narasi. Teori yang digunakan adalah teori modal dengan fokus pada pendalam modal simbolik, modal sosial, dan modal ekonomi sebagai pisau analisis. Data sekunder primer dikumpulkan melalui wawancara sedangkan data dikumpulkan menggunakan teknik dokumentasi dan metode kajian pustaka. Data dianalisis menggunakan metode deskriptif berdasarkan kerangka teori yang digunakan dalam penelitian ini. Kami menemukan, terdapat tiga modal yang dimanfaatkan dan dimiliki pasangan Tina-Ado sehingga menjadi faktor atas kemenangan tersebut yaitu: (1) modal sosial yang bersumber dari tokoh di Kabupaten Mamuju juga bersumber dari kepemilikan modal sosial oleh Tina-Ado; (2) modal ekonomi yang juga bersumber dari elit lokal dan kepemilikan Tina-Ado; (3) modal simbolik yang banyak bersumber dari elit lokal dan didukung oleh kepemilikan modal simbolik Tina-Ado. Hal lain menunjukkan bahwa faktor determinan yang paling berpengaruh dalam kemenangan Tina-Ado adalah adanya pengaruh kuat lokal yang menyentuh tiga modalitas tersebut, kemudian menjadi sumber kekuatan pasangan Tina-Ado untuk meraih kemenangan.

Kata kunci: pilkada, modalitas, elit lokal, Tina-Ado



ABSTRACT

ILHAMUDOIN. **The Analysis of Tina-Ado's Victory in the Regional Head Election of Mamuju Regency** (supervised by Armin and Ariana Yunus)

This study aims to analyze the factors of Tina-Ado's victory in the Regional Head Election (Pilkada) in Mamuju Regency in 2020. The type of research used is qualitative research, i. e. to describe in detail and in-depth an event or occurrence, a person's behavior or actions, or circumstances in a particular in the form of a narrative. The theory used is capital theory focusing on an in-depth research of symbolic capital, social capital, and economic capital as the author's tools of analysis. The primary data were collected through interview and the secondary data were obtained using documentary technique and literature review method. The data analysis method used is a descriptive method of the results of interview based on the framework of theory used in this study. The results indicate that there are three capitals utilized and owned by the Tina-Ado pair as the factors of their victory, namely (1) good social capital coming from leaders in Mamuju Regency and also coming from social capital owned by Tina-Ado, (2) economic capital which also comes from both local elites and Tina-Ado themselves, and (3) symbolic capital which mostly comes from local symbolic elites and supported by Tina-Ado's ownership of symbolic capital. Besides, the result also shows that the determinant factor or the most influential factor in Tina-Ado's victory is the existence of a powerful local elite concerning with the three modalities then become a source of strength of Tina-Ado's victory.

Keywords: regional head election, modality, local elite, Tina-Ado.



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PEGESAHAN	ii
PERNYATAAN KEASLIAN TESIS	iii
KATA PENGANTAR	iv
ABSTRAK	vii
ABSTRACT	viii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Rumusan Masalah.....	14
1.3. Tujuan Penelitian	14
1.4. Manfaat Penelitian	14
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	16
2.1. Teori Modal.....	16
2.1.1. Modal Sosial.....	20
2.1.2. Modal Ekonomi.....	24
2.1.3. Modal Simbolik.....	28
2.2. Penelitian Terdahulu	31
2.3. Kerangka Pemikiran.....	38
BAB III METODE PENELITIAN	42
3.1. Lokasi Penelitian.....	42
3.2. Pendekatan dan Jenis Penelitian	42
3.3. Jenis Data	44
3.4. Teknik Penentuan Informan	45
3.5. Teknik Pengumpulan Data.....	46
3.6. Teknik Analisis Data	49
BAB IV OBJEK PENELITIAN	50

4.1	Profil Kabupaten Mamuju	50
4.2	Profil Sitti Sutinah.	52
4.3	Profil Ado Mas'ud.....	54
4.4	Profil Partai Politik Pengusung Tina- Ado	55
BAB V HASIL PENELITIAN.....		58
5.1	Faktor Pendorong Kemenangan Pasangan Tina-Ado dalam Pemilihan Kepala Daerah di Kabupaten Mamuju Tahun 2020	58
5.1.1	Modal Sosial yang Dimiliki Pasangan Tina-Ado	59
5.1.2	Modal Ekonomi yang Dimiliki Pasangan Tina-Ado	71
5.1.3	Modal Simbolik yang Dimiliki Pasangan Tina-Ado	82
5.2.	Implikasi Teori	106
BAB VI KESIMPULAN		114
6.1	Kesimpulan.....	114
6.2	Saran.....	116
DAFTAR PUSTAKA.....		118
LAMPIRAN		122

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1. Perolehan Suara Pilkada Kab. Mamuju tahun 2020	5
Tabel 1.2. Laporan Dana Kampanye Pemilukada Kab. Mamuju Tahun 2020.....	11
Tabel 1.3. Perolehan Suara Pilkada Per Kecamatan di Kab. Mamuju tahun 2020	13
Tabel 5.1. Jumlah Kursi Partai Pengusung Tina-Ado	84
Tabel 5.2. <i>Grand Issu</i> yang Dikelola oleh Tim Pemenangan Tina-Ado	94
Tabel 5.3. Perolehan Suara Pilkada 3 Kec. di Kab. Mamuju	110
Tabel 5.4. Laporan Harta Kekayaan Pasangan No 1.....	119
Tabel 5.5. Laporan Dana Kampanye Pilkada Kab. Mamuju Tahun 2020.....	121

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Di beberapa negara termasuk Indonesia, demokrasi dijadikan sebagai alternatif dalam menata aktivitas bermasyarakat dan bernegara. Secara etimologis demokrasi terdiri dari dua kata yang berasal dari bahasa Yunani yaitu *demos* yang berarti rakyat atau penduduk suatu tempat dan *cratein* atau *cratos* yang berarti kekuasaan atau kedaulatan.¹ Secara bahasa *demos-cratein* atau *demos-cratos* adalah sistem pemerintahan berada di tangan rakyat, kekuasaan tertinggi berada dalam keputusan bersama rakyat, rakyat berkuasa, pemerintahan rakyat dan oleh rakyat. Doktrin *power of the people*, kekuasaan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat merupakan fondasi dasar dari demokrasi. Bahwa rakyat adalah pemegang kedaulatan tertinggi dalam sistem pemerintahan.²

Menurut Joseph A. Schmeter, demokrasi merupakan suatu perencanaan institusional untuk mencapai keputusan politik di mana individu-individu memperoleh kekuasaan untuk memutuskan cara perjuangan kompetitif atas suara rakyat.³ Demokrasi dianggap sebagai ruang pengambilan keputusan yang paling kolektif dan paling kuat melalui musyawarah, *voting* atau pemilihan umum yang adil, jujur dan berkala.

¹ Miriam Budiardjo. "*Dasar-Dasar Ilmu Politik*". (Jakarta: Gramedia, 2008). hlm. 461.

² Haedar Nashir. "*Pragmatisme Politik Kaum Elite*". (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999). hlm.37.

³ Azyumardi Azra. "*Demokrasi, Hak Asasi Manusia dan Masyarakat Madani*". (Jakarta: ICCE UIN Jakarta, 2000). hlm. 100.

Dalam sistem demokrasi para calon secara bebas bersaing untuk memperoleh suara dan hampir semua penduduk dewasa berhak memberikan suara. Sistem ini dalam pandangan Robert Dahl mengandung dua dimensi yaitu dimensi konteks dan dimensi partisipasi dan dua dimensi ini merupakan hal yang paling menentukan bagi demokrasi dan politik.⁴ Demokrasi sebagai sistem pemerintahan di Indonesia telah lama dipilih sebagai alternatif dalam menata masyarakat. Sejak zaman kemerdekaan sampai saat ini, Indonesia telah menjadi negara demokrasi.

Reformasi tahun 1998 membawa angin segar bagi perkembangan demokrasi di Indonesia. Sistem demokrasi partisipatoris dengan ciri dibukanya keran selebar-lebarnya untuk kebebasan berekspresi memberikan pengaruh relatif signifikan terhadap partisipasi politik masyarakat dan pembentukan partai politik. Masyarakat berbondong-bondong mendirikan partai politik untuk diikutsertakan dalam pemilu.⁵

Pemilihan umum merupakan salah satu indikator dalam sebuah negara demokrasi. Pemilihan umum di Indonesia terdiri dari Pemilihan Legislatif, Pemilihan Presiden, dan Pemilihan Kepala Daerah. Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah juncto Peraturan Pemerintah Nomor 49

⁴ Samuel P. Huntington. "*Gelombang Demokrasi Ketiga*". (Jakarta: Garfity, 1995). hlm.5.

⁵ Firman Noor. 2020. "*Demokrasi dan Oligarki*". (Jakarta: Bibliosmia). hlm. 15.

Tahun 2008 tentang Perubahan atas PP Nomor 6 Tahun 2005 adalah: "sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah Provinsi dan/atau Kabupaten/Kota berdasarkan Pancasila dan UUD Tahun 1945 untuk memilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah". Dalam kehidupan politik di daerah, pilkada merupakan salah satu kegiatan yang nilainya ekuivalen dengan pemilihan anggota DPRD. Ekuivalen tersebut ditunjukkan dengan kedudukan yang sejajar antara kepala daerah dan DPRD.

Pemilihan Kepala Daerah merupakan salah satu bentuk partisipasi politik sebagai manifestasi dinamika politik lokal. Pilkada juga menjadi cerminan pemilihan pemimpin ditingkat nasional, karena melibatkan partai politik yang berkoalisi maupun yang berposisi di level nasional. Kegiatan pilkada menjadi ajang masyarakat mengenal lebih dekat dengan pemimpinnya melalui kegiatan kampanye. Sehingga masyarakat mampu membuat keputusan untuk memilihnya⁶

Pasal 56 (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menyatakan bahwa Kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah dipilih dalam satu pasangan calon yang dilaksanakan secara demokratis berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. (2) Pasangan calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh partai politik atau gabungan partai politik.⁷

⁶ Mohammad Hidayatullah. 2020. "*Inverstor Politik pada Pemilihan Kepala Daerah di Indonesia*". (Jakarta: Lembaga Kajian Strategis dan Pembangunan). hlm. 1.

⁷ Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Pemilihan umum merupakan arena bagi para aktor politik yang ikut berkontestasi. Tidak hanya sekedar bagaimana kemenangan menjadi milik para aktor tetapi banyak hal yang terjadi dalam arena Pemilu tersebut. Misalnya melalui arena politik tersebut kita bisa membuat analisa tentang perilaku aktor bahkan sampai pada perilaku khalayak atau pemilih dalam hal ini masyarakat. Salah satu arena politik adalah Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) di Kabupaten Mamuju. Pemilihan kepala daerah di Kabupaten Mamuju tahun 2020, diikuti oleh dua pasangan calon Kepala Daerah. Pasangan nomor urut satu diisi oleh Siti Sutinah Suhardi dan Ado Mas'ud (Tina-Ado), sedangkan pasangan nomor urut dua diisi oleh Habsi Wahid dan Irwan Satya Putra Pababari (Habsi-Irwan). Pasangan Habsi-Irwan merupakan *Incumbent* dimana pada pemilihan kepala daerah tahun 2015 telah memenangkan kontestasi dengan perolehan suara 68.249 Suara (56,25%)⁸. Tetapi pada pilkada tahun 2020, Habsi-Irwan kalah dari pasangan Tina-Ado.

Pada Tanggal 17 Desember 2020, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Mamuju akhirnya menetapkan pasangan Tina-Ado sebagai peraih suara terbanyak. Berdasarkan hasil rapat pleno rekapitulasi dan penetapan hasil penghitungan suara Pilkada Mamuju 2020, Tina-Ado mengalahkan paslon petahana Habsi-Irwan dengan perolehan suara sebanyak 76.627, sedangkan Habsi-Irwan memperoleh 67.029 suara, selisih suara antara kedua paslon mencapai 9.598 suara. Jumlah suara

⁸ Liputan 6. 2020. "Raih 76.627 Suara, Tina-Ado Menangkan Pilkada Mamuju 2020, (Online)". <https://www.liputan6.com/pilkada/read/4435942/raih-76627-suara-tina-ado-menangkan-pilkada-mamuju-2020>, diakses 06 Januari 2022.

yang disalurkan di Pilkada Mamuju sebanyak 144.982 dengan suara sah sebanyak 143.656 dan suara tidak sah mencapai 1.326⁹.

Tabel 1.1. Perolehan Suara PILKADA Kab. Mamuju Tahun 2020¹⁰

Nomor Urut	Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	Sitti Sutinah Suhardi - Ado Mas'ud (Tina-Ado)	76.627 suara
2	Habsi Wahid - Irwan SP Pababari (Habsi-Irwan)	67.029 suara

Sumber: KPU Kab. Mamuju tahun 2020.

Terpilihnya Tina-Ado pada Pilkada Kabupaten Mamuju Tahun 2020 memunculkan wajah baru perpolitikan di Kabupaten Mamuju. Sitti Sutinah Suhardi merupakan Bupati perempuan pertama di Ibu Kota Provinsi Sulawesi Barat yang berhasil mengalahkan *Incumbent*. Kekalahan *Incumbent* tersebut merupakan kali pertama terjadi pada Pilkada di Kabupaten Mamuju. Perolehan suara tersebut cukup mengejutkan masyarakat dan pihak lawan (Habsi-Irwan) karena pasangan *Incumbent* merasa memiliki basis massa cukup banyak serta dalam beberapa survey yang dilakukan oleh lembaga survey yang berbeda-beda sebelum pemilihan, pasangan Habsi-Irwan unggul dari pasangan Tina-Ado. Tapi kenyataannya, Habsi-Irwan kalah.

Ada 4 penyebab kekalahan *Incumbent*. Pertama, tingkat kepuasan masyarakat atas kinerja pemerintahan Habsi-Irwan dibawah 70%. Angka ini dibawah standar nilai keberhasilan pemerintahan Habsi-Irwan. Kedua,

⁹ *Ibid.*

¹⁰ Dokumen Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Mamuju

lemahnya kerja-kerja pencitraan pasangan Habsi-Irwan selama menjabat maupun dalam proses Pilkada. Ketiga, dalam debat kandidat petahana kurang mampu menjelaskan keberhasilan dan kurang mampu meyakinkan program serta visi-misinya kedepan. Dan keempat, Ayah dari Sutina Dr. H. Suhardi Duka, M.M yang juga adalah Anggota DPR RI Fraksi Partai Demokrat memiliki *Strong Voters* yang kuat dan semuanya memilih Tina-Ado¹¹. Pada dasarnya, beberapa kelompok masyarakat Kabupaten Mamuju menginginkan calon yang suda dikenal lama oleh masyarakat serta telah terlihat kinerjanya. Namun, sebagian lainnya mengiginkan suasana baru dan mendambakan sosok Bupati baru yang lebih dekat dengan rakyatnya dan memiliki visi misi yang jelas untuk kepentingan rakyatnya.

Kemenangan Tina-Ado tentu telah didesain secara matang dengan melibatkan dan memanfaatkan seluruh potensi yang dimiliki. Sebagai pendatang baru, tentu tidak mudah bagi pasangan Tina-Ado dalam mengalahkan *Incumbent*. Pada dasarnya, *Incumbent* selalu memiliki investasi yang lebih dari pada pendatang baru. Lima tahun kepemimpinan adalah waktu yang cukup lama untuk membangun kepercayaan publik, membangun kekuatan politik, social bahkan kekuatan ekonomi untuk kemudian menjadi modal pada kontestasi politik berikutnya. Bahkan jika dimanfaatkan dengan baik, bisa menciptakan pemilih fanatik bagi *Incumbent*.

¹¹ Fajar.co.id. "Petahana Pilkada Tumbang, IPI ungkap 4 Faktor Penyebab". <https://fajar.co.id/2020/12/11/petahana-pilkada-mamuju-tumbang-ipi-ungkap-4-faktor-penyebabnya/> diakses pada 18 Maret 2022.

Menarik untuk mencermati figur seorang Tina sebagai modal yang dimanfaatkan dalam mengalahkan *Incumbent*. Sebelum maju sebagai Calon Bupati Mamuju 2020, Siti Sutinah Suhardi menjabat sebagai kepala Dinas Perdagangan Mamuju sejak tahun 2018 hingga 2019. Ia kemudian mundur dari jabatannya dan maju melawan petahana. Tina juga pernah menjabat sekretaris Dinas Perdagangan Mamuju 2017 hingga 2018. Kemudian Sekretaris Dinas Dikpora Mamuju 2015 hingga 2017, kabid Bapedalda Mamuju 2012 hingga 2015, kasubdit Pengembangan SDA Bappeda Mamuju 2009 hingga 2012, serta kasi Pelayanan Umum Kelurahan Mamunyu, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju Sulbar 2007 hingga 2009.

Pengalaman seorang Tina dalam memimpin birokrasi menjadi perhatian publik karena Sutina dianggap sebagai sosok birokrat yang bersih. Terbentuknya opini bahwa Sutina adalah seorang birokrat yang bersih menjadi alasan terbentuknya habitus masyarakat yang mempengaruhi perilaku masyarakat ketika menentukan pilihannya di bilik suara dalam arena pilkada, yang mana masyarakat menginginkan pemimpin yang bersih dan amanah.

Menurut dugaan awal penulis bahwa kemenangan yang diraih Tina-Ado karena telah memanfaatkan modalitas yang dimiliki. Secara teoritik, ada 4 modalitas yang dimiliki dan dimanfaatkan oleh kandidat dalam memenangkan setiap kontestasi yaitu, Modal Sosial, Modal Ekonomi, Modal Budaya dan Modal Simbolik . Pada penelitian ini, akan fokus pada

3 modal yang dimiliki dan dimanfaatkan oleh Tina-Ado sebagai factor pendorong dalam mengalahkan *Incumbent* yaitu Modal Sosial, Modal Ekonomi, dan Modal Simbolik.

Sutina merupakan anak dari seorang mantan Bupati Mamuju dua periode Dr. H. Suhardi Duka, M.M yang akrab dipanggil SDK menjabat dari tahun 2005 hingga 2015 dan kini menjabat sebagai anggota DPR RI dari fraksi Partai Demokrat. SDK juga adalah tokoh politik yang sangat terkenal dan berpengaruh di Sulawesi Barat bahkan diluar Sulawesi Barat serta terhitung sangat aktif dalam memperjuangkan kepentingan masyarakat. Selain itu SDK juga adalah kader terbaik Partai Demokrat sekaligus adalah ketua Dewan Pembina Partai Demokrat Prov. Sulawesi Barat, sehingga dalam pengambilan keputusan di internal partai Demokrat tidak terlepas dari intervensi SDK itu sendiri. Sebagaimana pemberian rekomendasi kepada Tina-Ado untuk diusung sebagai calon Bupati.

Pengaruh SDK dalam setiap kontestasi politik di Sulawesi Barat terlihat tidak hanya ketika berhasil memenangkan Sutina di Pilkada Mamuju 2020 tetapi juga pada Pilkada sebelumnya yaitu pada tahun 2015 partai Demokrat mengusung Habsi-Irwan dan berhasil memenangkan Pilkada dibawa *grand desain* dari SDK itu sendiri. Selain itu, SDK juga telah berhasil membawa anaknya Sitti Suraeda yang tak lain merupakan adik kandung dari Sutina, terpilih sebagai Anggota DPRD sekaligus Ketua DPRD Prov. Sulawesi Barat. Berdasarkan realitas tersebut, maka penulis menduga bahwa modal Simbolik yang dimiliki oleh pasangan Tina-Ado

adalah dengan memanfaatkan dukungan elit politik yaitu Suhardi Duka yang merupakan ayah kandung dari Sutina sendiri.

Selain modal Simbolik dari dukungan elit yaitu Ayah kandung Sutina, modal Simbolik lainnya adalah dukungan partai politik dimana terlihat ketika dalam proses pencalonan Tina-Ado diusung oleh sebelas Partai Politik yaitu Partai Demokrat, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Partai Gerakan Indonesia Raya (GERINDRA), Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Bulan Bintang (PBB), Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Perindo, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) dan didukung oleh partai baru yaitu Partai Gelombang Rakyat (GELORA).

Melalui 11 partai politik tersebut selain menjadi kendaraan politik untuk ikut dalam kontestasi Pilkada Mamuju, Tina-Ado juga memanfaatkannya dalam melakukan kampanye kepada masyarakat dengan menjual visi misi yang didesain bersama secara kreatif. Tidak bisa dipungkiri bahwa eksistensi partai politik adalah wadah yang sangat dibutuhkan dalam melakukan konsolidasi politik, komunikasi politik serta marketing politik. Pada hakikatnya, partai politik diharapkan mampu menjadi wadah aspirasi dari kepentingan masyarakat. Sebagaimana belakangan ini partai politik punya peran yang representatif dalam mempengaruhi kebijakan publik. Oleh sebab itu melalui 11 partai politik koalisi pemenangan Tina-Ado menjangkau seluruh lapisan masyarakat

dalam mengkampanyekan kepentingannya untuk memilih pasangan Tina-Ado sebagai Bupati Mamuju.

Selain modal Simbolik, modal ekonomi juga menjadi bagian yang sangat penting dalam setiap kontestasi politik. Dugaan awal dalam penelitian ini bahwa Tina-Ado memiliki Modal ekonomi yang besar untuk maju sebagai calon kepala daerah. Sesuai dengan hasil laporan dana kampanye peserta pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mamuju tahun 2020, pasangan Tina-Ado memiliki dana kampanye dua kali lipat dari pasangan Hasbi-Irwan yaitu Rp. 1.000.000.000 sedangkan pasangan Hasbi-Irwan hanya memiliki dana kampanye Rp. 551.00.000¹². Dengan melihat laporan dana kampanye tersebut, dapat disimpulkan bahwa pasangan Tina-Ado juga mempunyai modal Ekonomi yang cukup besar dibandingkan pasangan calon Hasbi-Irwan. Sehingga Modal Ekonomi juga berpengaruh terhadap terpilihnya pasangan Tina-Ado dalam melawan *Incumbent*.

¹² Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamuju tahun 2020.

**Tabel 1.2. Laporan Dana Kampanye Pilkada
Kab. Mamuju Tahun 2020¹³**

No	Nama Pasangan Calon	Hasil Audit	Dana Kampanye		
			Penerimaan	Pengeluaran	Saldo
1	Sitti Sutinah Suhardi, SH., M.Si - Ado Mas'ud, S.Sos	PATUH	Rp. 1.000.000.00 0	Rp. 980.348.500	Rp. 19.651.50 0
2	Drs. H. Habsi Wahid, MM – H. Irwan SP Pababari, SH., MTP	PATUH	Rp. 551.000.000	Rp. 548.500.000	Rp. 2.500.000

Sumber: KPU Kab. Mamuju tahun 2020

Modalitas lain yang dimiliki dan dimanfaatkan Tina-Ado selain Modal Simbolik dan Ekonomi dalam mendukung kemenangannya adalah Modal Sosial. Menurut dugaan awal dalam penelitian ini modal sosial banyak bersumber dari SDK ayah Sutinah itu sendiri dan wakilnya Ado Mas'ud. Keterkenalan seorang SDK selain sebagai tokoh politik di Sulawesi Barat, juga memiliki modal sosial yang tinggi, dimana SDK sangat aktif dalam memberikan bantuan kepada masyarakat sehingga tak heran jika setiap kontestasi politik yang melibatkan dirinya selalu berhasil mengalahkan lawannya meskipun pernah kalah pada pemilihan Gubernur Sulawesi Barat, namun itu dikarenakan faktor lain dan membutuhkan kajian tersendiri. Figur sosial seorang SDK terlihat ketika berhasil menciptakan strong voters hingga 29% orang dan menjadi pemilih fanatik bagi SDK yang kemudian semuanya memilih Tina-Ado sebagai Bupati Mamuju pada Pilkada tahun 2020.

¹³ Dokumen Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Mamuju

Sementara modal sosial Ado Mas'ud yang merupakan anggota Legislatif DPRD Kab. Mamuju Fraksi Partai Demokrasi Indonesia (PDIP) periode 2014-2019 dan 2019-2024. Terpilihnya Ado Mas'ud sebagai anggota legislatif yang kedua kalinya, menjadi alasan bahwa masyarakat telah menempatkan kepercayaannya kepada salah seorang wakil rakyat untuk membawa aspirasi dalam hal ini demi kepentingan masyarakat itu sendiri. Sebagaimana Robert Putnam (1993): Modal Sosial adalah suatu *Mutual Trust* antara anggota masyarakat dan masyarakat terhadap pemimpinnya. Modal Sosial didefinisikan sebagai institusi sosial yang melibatkan jaringan (*networks*), norma-norma (*norms*), dan kepercayaan sosial (*Social Trust*) yang mendorong kepada sebuah kolaborasi sosial (koordinasi dan kooperasi) untuk kepentingan bersama.

Ado Mas'ud memiliki basis suara di daerah pemilihan IV (Kalukku, Bonehau dan Kalumpang). Sesuai dengan rekapitulasi perolehan suara KPU Kab. Mamuju tahun 2020, pasangan Tina-Ado mendapatkan tambahan suara dari Kecamatan Kalukku 19.310 sedangkan pasangan Has bi-Irwan hanya mendapatkan 11.787 suara (selisi 7.523 suara). Dengan perolehan suara tersebut, menjadikan Kecamatan Kalukku sebagai lumbung suara pasangan Tina-Ado dalam pilkada Kab. Mamuju tahun 2020.

Berikut ini adalah hasil perolehan suara pilkada Kab. Mamuju tahun 2020 berdasarkan Kecamatan:

Tabel 1.3. Perolehan Suara Pilkada per Kecamatan di Kab. Mamuju Tahun 2020

No	Kecamatan	Perolehan Suara (01)	Perolehan Suara (02)
1	Bala-Balakang	692	479
2	Simboro	8.916	7.545
3	Bonehau	2.579	2.586
4	Kalukku	19.310	11.787
5	Tapalang Barat	2.716	3.176
6	Mamuju	16.897	14.205
7	Tommo	5.631	6.897
8	Kalumpang	2.859	3.621
9	Tapalang	5.470	5.627
10	Sampang	4.841	4.086
11	Papalang	6.716	7.020

Sumber: Komisi Pemilihan Umum RI Tahun 2020.

Berdasarkan penjelasan diatas, dinamika politik pada Pemilihan Kepala Daerah di Kabupaten Mamuju menghadirkan fenomena politik baru di Kabupaten Mamuju itu sendiri. Kekalahan *Incumbent* adalah kali pertama terjadi di Kab. Mamuju oleh pendatang baru. Dugaan awal pada penelitian ini adalah, kemenangan Tina-Ado tersebut karena empat modalitas yang dimiliki dan dimanfaatkan oleh Tina-Ado yakni: *Pertama*, memanfaatkan modal Simbolik dari Ayah kandung Sutina mulai dari proses memilih partai pengusung, konsolidasi dan penjajakan Koalisi Partai Politik, sampai pada mendesain secara matang dan terstruktur peta kemenangan. *Kedua*, modal sosial yang juga dimiliki oleh Ayah kandung Sutina serta modal sosial yang dimiliki oleh Ado Mas'Ud sendiri. *Ketiga* adalah modal ekonomi yang dimiliki oleh Tina dan Ado dalam mendukung

kemenangannya melawan *Incumbent*. Dan ke empat, modal budaya dengan melihat latar belakang Tina dan Ado. Oleh sebab itu penulis menganggap penting untuk melakukan kajian akademik dengan judul “Analisis Kemenangan Pasangan Tina-Ado dalam Pemilihan Kepala Daerah di Kabupaten Mamuju Tahun 2020”.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan atas dinamika politik yang terjadi pada pemilihan Kepala Daerah di Kabupaten Mamuju Tahun 2020 maka penulis menyimpulkan Rumusan Masalah yang ada dalam penelitian ini adalah: Mengapa Pasangan Tina dan Ado Mampu Mengalahkan *Incumbent* Pada Pemilihan Kepala Daerah di Kabupaten Mamuju Tahun 2020?

1.3. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini, sesuai dengan rumusan masalah yang akan diteliti adalah Menganalisis faktor- faktor kemenangan pasangan Tina- Ado dalam Pemilihan Kepala Daerah di Kabupaten Mamuju tahun 2020.

1.4. Manfaat Penelitian

Sejalan dengan tujuan penelitian sebagaimana dirumuskan diatas maka penelitian ini diharapkan mempunyai manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Akademis, Secara umum temuan penelitian ini diharapkan dapat mengembangkan ilmu pengetahuan serta dapat memberi wawasan baru bagi dunia pendidikan ilmu politik, serta dapat

memperkaya hasil penelitian khususnya yang berkaitan dengan analisis kemenangan calon kepala daerah dalam sebuah kontestasi pemilihan kepala daerah yang dilaksanakan setiap lima tahun sekali.

2. Manfaat Praktis, diharapkan dapat digunakan sebagai wahana dalam mengkaji secara ilmiah gejala-gejala yang ditemukan dalam praktek perpolitikan khususnya dalam pemilihan kepala daerah dan dapat pula dijadikan rujukan dan perbandingan bagi kandidat lainnya yang ingin maju sebagai calon kepala daerah. Adapun temuan penelitian ini diharapkan dapat menjadi inspirasi bagi calon peneliti yang tertarik untuk melakukan penelitian dan juga mengembangkannya dibidang lainnya.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Teori Modal

Pierre Bourdieu (1986), dalam bukunya *The Forms of Capital* membedakan tiga bentuk modal yakni modal ekonomi, modal budaya, dan modal sosial. Menurut Bourdieu (1986) Modal budaya dapat mencakup rentangan luas properti, seperti seni, pendidikan, dan bentuk-bentuk bahasa. Bagi Bourdieu, modal berperan sebagai relasi sosial yang terdapat di dalam suatu sistem pertukaran, dan istilah ini diperluas pada segala bentuk barang baik materil maupun simbol, tanpa perbedaan yang mempresentasikan dirinya sebagai sesuatu yang jarang dan layak untuk dicari dalam sebuah formasi sosial tertentu.¹⁴

Modal (Bourdieu) sebagai basis dominasi. Beragam jenis modal dapat ditukar dengan jenis-jenis modal lainnya. Yang artinya modal bersifat nilai ditukar. Penukaran paling hebat yang telah dibuat adalah penukaran pada modal simbolik, sebab dalam bentuk inilah modal yang berbeda dipersepsi dan dikenali sebagai sesuatu yang legitimate. Agar dipandang sebagai seseorang atau kelas yang berstatus dan mempunyai prestise, berarti ia harus diterima sebagai sesuatu yang legitimate. Posisi semacam itu membawa kekuasaan untuk memberi nama (aktivitas,

¹⁴ Haryatmoko. *Menyingkap Kepalsuan Budaya Penguasa: Landasan Teoritis Gerakan Sosial Menurut Pierre Bourdieu. Dalam majalah BASIS Edisi Khusus Pierre Bourdieu.* (Edisi November-Desember 2003), hlm. 23.

kelompok) kekuasaan mewakili pendapat umum dan utamanya, kekuasaan menciptakan “versi dunia sosial yang resmi”.¹⁵

Dalam abad ke-16 dan 17 istilah “*capital*” digunakan untuk menunjuk kepada, atau (a) stok uang yang akan dipakai untuk membeli komoditi fisik yang kemudian dijual guna memperoleh keuntungan, atau (b) stok komoditi itu sendiri. Pada waktu itu istilah “*stock*” dan istilah “*capital*” sering dipakai secara sinonim. Perusahaan dagang Inggris yang didirikan dalam masa itu atas dasar saham misalnya, dikenal sebagai “*join stock companies*” atau “*capital stock companies*”. Adam Smith dalam *the wealth of nation* (1776) dikutip Augusto Bunga (2008), pembedaan ini didasarkan atas kriteria sejauh mana suatu unsur modal itu dalam jangka waktu tertentu hanya dikonsumsi sebagian (kecil) nilainya menjadi susut, maka unsur itu disebut “*fixed capital*” (misal mesin, bangunan, dan sebagainya). Tetapi jika unsur modal dikonsumsi secara total, maka ia disebut “*circulating capital*” (misal tenaga kerja, bahan mentah dan sarana produksi).¹⁶

Dalam operasionalisasi Modal yang dimiliki oleh kandidat, maka modal yang dimiliki harus mampu menciptakan habitus di masyarakat tentang diri kandidat yang dengan begitu mempengaruhi pemilih.

¹⁵ Stella Maria Ignasia Pantouw. (2012). Modalitas Dalam Kontestasi Politik (Studi tentang Modalitas dalam Kemenangan Pasangan Hanny Sondakh dan Maximiliaan Lomban pada Pemilu di Kota Bitung Sulawesi Utara tahun 2010). (Tesis, Universitas Diponegoro Semarang).

¹⁶ Stella Maria Ignasia Pantouw. (2012). “Modalitas Dalam Kontestasi Politik (Studi tentang Modalitas dalam Kemenangan Pasangan Hanny Sondakh dan Maximiliaan Lomban pada Pemilu di Kota Bitung Sulawesi Utara tahun 2010)”. (Tesis, Universitas Diponegoro Semarang).

Sementara, tidak cukup dengan memiliki modal dan mampu menciptakan habitus di masyarakat, modal dan habitus yang tercipta kemudian di operasionalkan dalam ranah politik sehingga iya menjadi bermakna.

Modal harus ada dalam sebuah ranah, agar ranah tersebut dapat memiliki arti. Namun, hal itu juga dapat dijelaskan pada tingkat yang lain dengan menggunakan rumusan generatif. Penjelasan seperti ini sedikit bersifat artifisial namun bermanfaat. Keterkaitan antara ranah, habitus, modal bersifat langsung. Nilai yang diberikan modal dihubungkan dengan berbagai karakteristik sosial dan kultural habitus. Ranah dikitari oleh relasi kekuasaan objektif yang memiliki basis material. Jenis-jenis modal yang dikenali dalam ranah-ranah tertentu dan yang digabungkan ke dalam habitus, sebagian juga dihasilkan oleh basis material tersebut.¹⁷

Habitus Menurut Bourdieu dalam Hussain (2013:3) orientasi untuk tingkah laku dan struktur persepsi ini yang memastikan keintelektualan individu dalam dunia sosial adalah sama, aktor ini merasakan dan berhadapan dengan pengalaman yang tidak sama dalam wujud dan aspek yang berbeda dengan kenyataan yang dihadapi dalam dunia sosial.

Habitus sering digunakan dalam menerangkan norma-norma sosial atau sikap yang diarahkan oleh norma pembentuknya. Proses pembentukan habitus dalam diri aktor dilakukan secara terus-menerus melalui tindakan, pola berpikir, dan mempersepsi dunia sosialnya yang nantinya akan memimpinya dalam menghadapi arena pertarungan yang

¹⁷ Haryatmoko. *Menyingkap Kepalsuan Budaya Penguasa: Landasan Teoritis Gerakan Sosial Menurut Pierre Bourdieu*. Dalam majalah *BASIS Edisi Khusus Pierre Bourdieu*. (Edisi November-Desember 2003), hlm. 23.

selalu dihadapinya. Cara kerja habitus dapat membimbing aktor untuk mengenali, menilai, dan merasakan apresiasi yang ditunjukkan oleh dunia sosial karena menjadi cerminan bagi massa pendukungnya. Sebagai kerangka klasifikatif, habitus dapat dapat menghasilkan perbedaan gaya hidup yang kontras dan praktik-praktik kehidupan dalam kehidupan diri aktor.

Kerangka kerja habitus ini diperoleh berdasarkan pengalaman aktor dalam berinteraksi dengan masyarakat ataupun lawan politiknya untuk memperebutkan kursi Pemilu. Pengalaman yang dirasakan aktor diandaikan sebagai sikap, kecenderungan mempersepsi, merasakan, berpikir yang kesemuanya itu sudah terinternalisasi dalam diri berkat pengalaman objektif ataupun subjektif yang dirasakannya. Ranah Bourdieu dalam Fashri (2014:105-106) mendefinisikan ranah sebagai arena kekuatan yang didalamnya terdapat upaya perjuangan untuk memperebutkan sumber daya (modal) dan juga demi memperoleh akses tertentu yang dekat dengan hierarki kekuasaan.

Arena politik di tingkat Daerah Pemilihan dalam hal ini menjadi realitas terjadinya pertarungan antar aktor untuk memperebutkan sumber-sumber modal yang dapat diakumulasikan untuk bisa memiliki kekuasaan politik. Dalam ranah, modal mengambil peranan yang sangat penting, karena penguasaan modal ini akan menentukan posisi seseorang. Semakin besar kekuasaan aktor terhadap modal akan semakin kokoh posisinya dan semakin eksis.

Dalam penelitian ini fokus pada teori modal sosial, Modal Ekonomi, Modal Budaya dan Modal Simbolik sehingga pendekatan dan kajian teori yang lebih fokus dan mendalam. Modalitas dalam Kontestasi Politik adalah modalitas selain peran figur tertentu dalam proses kontestasi politik, juga sangat ditentukan oleh peran dukungan sosial dan ekonomi, aktor- aktor sosial, politik dan ekonomi baik yang terlibat secara langsung dalam kontestasi pemilihan politik ataupun yang menjadi bagian dari *support system* untuk pemenangan pilkada. Olehnya Penulis menjabarkan 4 (Empat) modalitas yang harus dimiliki kandidat baik yang melekat pada dirinya ataupun yang dapat dimanfaatkan oleh kandidat, sebagai berikut:

2.1.1. Modal Sosial

Latar belakang sosial yang dimiliki calon bisa dicermati seperti, tingkat pendidikan, pekerjaan awal, ketokohnya di dalam masyarakat (tokoh agama, adat, organisasi kepemudaan, profesi dan lain sebagainya) merupakan Modal sosial yang harus dimiliki kandidat berkaitan dengan membangun relasi dan kepercayaan dari masyarakat bahwa kekuasaan juga diperoleh karena kepercayaan.

Kepercayaan di gunakan untuk memperoleh kedudukan seseorang atau sekelompok orang yang memang dapat dipercaya atas dasar kepercayaan masyarakat. Jika kekuasaan dilanggar, maka masyarakat dengan mudah tidak percaya lagi kepada pemegang kekuasaan. Pengaruh ketokohan dan popularitas, latar belakang pendidikan dan pekerjaan kandidat menentukan pemenangan pilkada, karena untuk

membangun relasi dan kepercayaan dari masyarakat kandidat harus memiliki pengaruh tersebut.

Pandangan para pakar dalam mendefinisikan modal sosial di bagi dalam dua kelompok. Pertama menekankan pada jaringian hubungan sosial (*sosial network*), sedangkan kelompok kedua lebih menekankan pada karakteristik yang melekat (*embedded*) pada diri individu manusia yang terlibat dalam sebuah interaksi sosial. Sejumlah ahli menyampaikan pandangan berbeda tentang modal sosial tetapi memiliki korelasi seperti diolah Mefi Hermawati yang dapat dicermati sebagai berikut:

- a. Robert Putnam (1993): modal sosial adalah suatu mutual trust antara anggota masyarakat dan masyarakat terhadap pemimpinnya. Modal sosial didefinisikan sebagai institusi sosial yang melibatkan jaringan (*networks*), norma-norma (*norms*), dan kepercayaan sosial (*social trust*) yang mendorong kepada sebuah kolaborasi sosial (koordinasi dan kooperasi) untuk kepentingan bersama. Pendapat ini mengandung pengertian diperlukan ikatan/jaringan sosial yang ada dalam masyarakat, dan norma yang mendorong produktivitas. Putman juga melonggarkan makna asosiasi horisontal, tidak hanya yang memberi desirable outcome (hasil pendapatan yang diharapkan) melainkan juga *undesirable outcome* (hasil tambahan).
- b. Pierre Bourdieu (1970), mendefinisikan modal sosial sebagai “sumber daya aktual dan potensial yang dimiliki seseorang berasal dari jaringan sosial yang terlembagakan serta berlangsung terus

menerus dalam bentuk pengakuan dan pengenalan timbal balik (atau dengan kata lain: keanggotaan dalam kelompok sosial) yang memberikan kepada anggotanya berbagai bentuk dukungan kolektif". Bourdieu juga menegaskan modal sosial sebagai sesuatu yang berhubungan satu dengan yang lain, baik ekonomi, budaya, maupun bentuk-bentuk social capital (modal sosial) berupa insitusi lokal atau kekayaan sumber daya alam. Pendapatnya menegaskan tentang modal sosial mengacu pada keuntungan dan kesempatan yang didapatkan seseorang di dalam masyarakat melalui keanggotaannya dalam entitas sosial tertentu (paguyuban, kelompok arisan, asosiasi tertentu).

- c. James Coleman (1999) mendefinisikan modal sosial sebagai suatu yang memiliki dua ciri, yaitu merupakan aspek dari struktur sosial serta memfasilitasi tindakan individu dalam struktur sosial tersebut. Dalam pengertian ini, bentuk-bentuk modal sosial berupa kewajiban dan harapan, potensi informasi, norma dan sanksi yang efektif, hubungan otoritas, serta organisasi sosial yang bisa digunakan secara tepat dan melahirkan kontrak sosial. Coleman membagi dua kubu, yaitu sosiologis dan ekonom yang masing-masing berbeda ketika melihat modal sosial sebagai entitas dalam ruang partisipasi publik.¹⁸

¹⁸ Stella Maria Ignasia Pantouw. (2012). *“Modalitas Dalam Kontestasi Politik (Studi tentang Modalitas dalam Kemenangan Pasangan Hanny Sondakh dan Maximiliaan Lomban pada Pemilu pada di Kota Bitung Sulawesi Utara tahun 2010)”*. (Tesis, Universitas Diponegoro Semarang).

Sementara bahasan mengenai *trust* jadi unsur penting dalam kajian Francis Fukuyama yang terkait dengan kebajikan sosial dan modal sosial. Fukuyama mendefinisikan modal sosial (*social capital*) sebagai serangkaian nilai atau norma-norma informal yang dimiliki bersama diantara anggota suatu kelompok yang memungkinkan terjalinnya kerjasama diantara mereka. Fukuyama mengeksplorasi modal sosial guna mendeskripsikan bahwa masyarakat dengan kepercayaan tinggi, dijamin sukses menjalankan visi dan misinya (*high-trust society*). Sebaliknya, sikap saling curiga, suka menaruh kecewa kepada unit masyarakat yang lain, selalu menabung cemburu satu sama lain, adalah indikasi rendahnya kepercayaan (*low-trust society*) di masyarakat. Atau diistilahkan dengan *zero trust society*, ketiadaan kepercayaan. Analoginya adalah ketika seorang calon anggota legislatif terpilih tidak berdasarkan modal sosial berupa kepercayaan yang tinggi, akan kesulitan menjalankan misi politik sehari-harinya.¹⁹

Modal sosial bagi Fukuyama adalah kapabilitas yang muncul dari kepercayaan umum di dalam sebuah masyarakat atau dibagian-bagian tertentu darinya. Ia bisa dilembagakan dalam kelompok sosial yang paling kecil dan paling mendasar, modal sosial berbeda dengan modal manusia (*human capital*) sejauh ia bisa diciptakan dan ditransmisikan melalui mekanisme kultural seperti agama, tradisi atau sejarah.²⁰ Modal sosial

¹⁹ Fukuyama, Francis, (terjemahan Ruslani). 2002. "*Trust, Kebajikan Sosial dan Penciptaan Kemakmuran*". Yogyakarta: Penerbit Qalam.

²⁰ Fukuyama, Francis, (terjemahan Ruslani). 2002. "*Trust, Kebajikan Sosial dan Penciptaan Kemakmuran*". Yogyakarta: Penerbit Qalam.

yaitu dukungan figur kandidat karena ketokohan sehingga adanya kepercayaan dari masyarakat menciptakan interaksi sosial dan adanya jaringan-jaringan yang mendukung.

2.1.2. Modal Ekonomi

Dalam pilkada tentu setiap kandidat dalam mempersiapkan dan menghadapi kontestasi perlu modalitas ekonomi atau dana politik yang tidak sedikit, karena berkaitan dengan pembiayaan yang besar atau berdasarkan penggunaan dana politik itu sendiri.

Pengertian modal ekonomi berangkat dari pemahaman terhadap benda yang memiliki nilai ekonomis yang disimbolkan dengan uang/mata uang. Dalam perspektif ekonomi, modal bisa pula berupa investasi yang diberikan seseorang pada pihak lain, kemudian dipertukarkan dengan keuntungan berupa barang atau uang/jasa politik. Modal ekonomi memiliki makna penting sebagai “penggerak” dan “pelumas” mesin politik yang dipakai. Didalam musim kampanye misalnya membutuhkan uang yang besar untuk membiayai berbagai kebutuhan seperti mencetak poster, spanduk, membayar iklan, dan berbagai kebutuhan yang lainnya. Bahkan modal ekonomi dapat menjadi prasyarat utama ketika calon itu bukan berasal dari partai yang dicalonkannya.

Para ekonom telah lama berbicara mengenai modal (*capital*) ini, khususnya modal ekonomi atau finansial (*financial capital*). Modal finansial adalah sejumlah uang yang dapat dipergunakan untuk membeli fasilitas dan alat- alat produksi perusahaan (misalnya pabrik, mesin, alat kantor,

kendaraan) atau sejumlah uang yang dapat dikumpul atau ditabung untuk investasi di masa depan. Konsep modal seperti ini relatif mudah dipahami oleh orang awam sekalipun, karena membelanjakan atau menginvestasikan uang merupakan bagian kehidupan sehari-hari manusia dan melibatkan pemikiran yang jelas. Modal financial juga mudah untuk diukur. Uang dapat dihitung, karena jumlah uang yang dibelanjakan dapat diidentifikasi dengan barang yang dibeli.

Pilihan publik dalam pemilihan umum pada perspektif politik dan ekonomi adalah proses dimana preference individu dikombinasikan ke dalam keputusan kolektif. Perbedaannya dalam perspektif politik, maka dalam perspektif ekonomi, konsep pilihan publik dalam pemilihan umum merupakan transformasi dari ekonomi klasik yang secara sederhana.

Kandidat memerlukan dukungan ekonomi selain dari kandidat juga berasal dari aktor-aktor ekonomi untuk kemenangan pilkada dalam pembiayaan semua kegiatan politik kandidat. Menurut Sahdan dan Haboddin bahwa Proses politik pilkada membutuhkan biaya/ongkos yang sangat mahal. Hal ini menyebabkan tantangan bagi proses perkembangan demokrasi lokal, karena kandidat yang bertarung adalah para pemilik uang/modal yang besar.

Mahalnya ongkos pilkada dapat disebabkan oleh 3 (tiga) faktor, yaitu:

- a. Pasangan calon kepala daerah yang akan bertarung diharuskan membeli partai politik sebagai kendaraan politik. Partai politik yang

akan dijadikan kendaraan dalam pilkada mengharuskan pasangan calon untuk menyeter danaa sumbangan hingga miliaran rupiah.

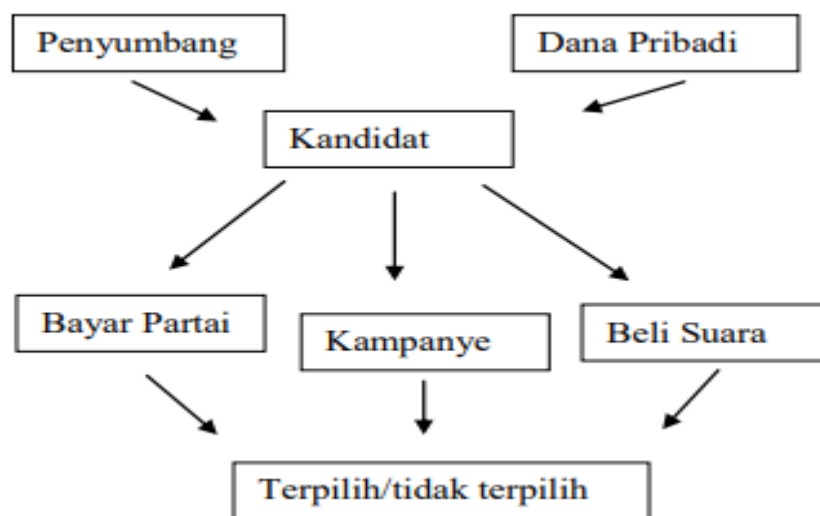
- b. Model kampanye politik yang dilakukan oleh pasangan calon membutuhkan banyak biaya. Misalnya, buat poster, pemasangan iklan di media massa baik cetak maupun elektronika.
- c. Untuk membujuk pemilih biasanya menggunakan praktek politik uang. Model pemberian uang kepada pemilih biasanya dilakukan hampir pada setiap proses pentahapan pilkada. Peredaran uang yang paling menonjol pada saat kampanye pasangan kandidat dan menjelang pemungutan suara.

Ditambahkan Sahdan dan Haboddin, bahwa setiap penyelenggaraan pilkada membutuhkan “dana politik” untuk biaya kegiatan pilkada. Istilah dana politik dapat dibedakan dengan melihat sumber dan penggunaan, yaitu:

- a. Dilihat dari sumbernya, dana politik berasal dari sumbangan pasangan calon dan sumbangan dari para simpatisan (donatur) baik secara perseorangan maupun perusahaan. Dana politik juga bisa diartikan sebagai wujud konkrit dari partisipasi dan dukungan masyarakat terhadap pasangan calon kepala daerah.
- b. Dari sisi pengguna, dana politik dibedakan berdasarkan bentuk peruntukan pengeluarannya menjadi pengeluaran untuk membiayai aktivitas rutin partai politik dan pengeluaran kampanye. Dalam konteks pilkada penggunaan dana politik dilakukan oleh calon

pasangan tidak hanya untuk pengeluaran kampanye dalam bentuk mencetak brosur, konvoi, biaya transportasi, biaya konsumsi, cetak kaos, poster dan iklan. Tetapi juga mengenai pengeluaran pasangan calon untuk bayar partai politik yang akan dijadikan kendaraan politik, dan membeli suara masyarakat.

Modal Ekonomi yaitu dukungan ekonomi berupa dana politik baik itu berdasarkan sumbernya dari dana pribadi dan donatur, dan berdasarkan penggunaannya untuk bayar partai politik, kampanye dan beli suara, untuk pemenangan pilkada. Berikut bagan yang dipaparkan oleh Sahdan (2009) seperti berikut :



Bagan di atas menunjukkan bahwa dana politik kandidat bersumber dari dana pribadi dan Penyumbang dari simpatisan (donatur) baik secara perseorangan maupun perusahaan dan dana politik berdasarkan penggunaannya dipergunakan untuk bayar partai, kampanye dan beli

suara. Pengeluaran biaya sangat besar dimungkinkan dalam sistem pilkada, mengingat arena kontestasi yang sangat terbuka dan kompetitif apalagi pemilih ditempatkan sebagai penentu apakah pasangan dipilih/tidak dipilih yang terpengaruh oleh besarnya dana politik kandidat. Hal inilah yang membuat kandidat dan proses pilkada mengakibatkan dana politik yang sangat mahal, karena pelaksanaan pilkada sejak persiapan hingga kampanye, mobilisasi dan keperluan cost politik lainnya oleh kandidat mempunyai pengaruh terhadap biaya yang diperlukan berdasarkan penggunaannya dan besarnya modalitas kandidat terkadang menjadi alasan parpol mengusung kandidat dan mengambil keuntungan dari kekuatan modalitas kandidat.

2.1.3. Modal Simbolik

Kekuasaan simbolik membutuhkan simbol-simbol kekuasaan seperti jabatan, mobil mewah, kantor, prestise, gelar, status tinggi dan keluarga ternama. Artinya modal simbolik adalah semua bentuk pengakuan oleh kelompok baik secara institusional atau non-institusional. Simbol ini memiliki kekuatan untuk mengkontruksi realitas, yang mampu menggiring orang untuk mempercayai, mengakui dan mengubah pandangan mereka tentang realitas seseorang, sekelompok orang, sebuah partai politik atau sebuah bangsa²¹.

Kandidat dalam pilkada memerlukan dukungan politik diusung dari partai politik (koalisi partai). Partai politik adalah organisasi politik yang

²¹ *Ibid.*, Hal 11

mengajukan kandidat dalam pilkada dan wakil kepala daerah untuk mengisi jabatan politik di pemerintahan dan kemudian dipilih oleh rakyat sedangkan Pemilu adalah merupakan suatu cara atau sarana untuk menentukan orang-orang yang akan mewakili rakyat dalam menjalankan roda pemerintahan. Namun kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagai arena kompetisi antar kandidat calon kepala daerah yang dicalonkan oleh partai politik (koalisi partai), fungsi partai politik sebagai alat untuk memobilisasi dukungan relatif kecil sehingga kandidat yang ingin memenangkan pilkada harus sebanyak mungkin memanfaatkan jaringan organisasi-organisasi politik untuk memperoleh dukungan politik karena kompetisi lebih menonjol terhadap pengaruh figur kandidat.

Pengertian modal politik dalam ilmu sosial memang masih terus dipertajam dan publikasi mengenai modal politik ini jauh lebih sedikit dibanding publikasi mengenai modal simbolik (*symbolic capital*), modal sosial (*social capital*), modal budaya (*cultural capital*) maupun modal ekonomi (*economic capital*).

Sosiolog Prancis, Pierre Bourdieu (1930-2002), adalah sosok pelopor dalam mengkaji berbagai bentuk modal itu (*multiple forms of capital*). Namun Bourdieu sering dikritik karena cenderung deterministik dan kurang berpijak pada hal-hal empirik dalam membangun teorinya. Kecenderungan kurang berpijaknya Bourdieu pada kenyataan empirik yang kemungkinan membuatnya tidak sempat menajamkan uraiannya mengenai modal politik padahal dinamika akumulasi dan penggunaan

modal politik memiliki lingkaran pengaruh sangat besar bagi kehidupan sehari-hari.

Casey (Sudirman Nasir: 2009) mendefinisikan modal politik sebagai pendayagunaan keseluruhan jenis modal yang dimiliki seorang pelaku politik atau sebuah lembaga politik untuk menghasilkan tindakan politik yang menguntungkan dan memperkuat posisi pelaku politik atau lembaga politik bersangkutan. Casey lebih lanjut memerinci adanya empat pasar politik yang berpengaruh pada besaran modal politik yang dimiliki oleh seorang pelaku politik atau sebuah lembaga politik. Pasar politik pertama adalah pemilu karena pemilu adalah instrumen dasar untuk pemilihan pemimpin dalam sistem demokrasi, pasar politik kedua adalah perumusan dan pelaksanaan kebijakan-kebijakan publik. Pasar politik ketiga adalah dinamika hubungan dan konflik antara pelaku politik dan lembaga politik dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan-kebijakan publik. Pasar politik keempat adalah pendapat atau pandangan umum (*public opinion*) mengenai pelaku politik atau lembaga politik itu.

Ahli politik J.A. Booth dan P.B. Richard mengartikan modal politik sebagai aktifitas warga negara untuk mencapai kekuasaan dan demokrasi. A.Hick dan J.Misra (1993) mengatakan modal politik adalah berbagai fokus pemberian kekuasaan/sumber daya untuk merealisasikan hal-hal yang dapat mewujudkan kepentingan meraih kekuasaan. Intinya, modal politik adalah kekuasaan yang dimiliki seseorang, yang kemudian bisa dioperasikan atau berkontribusi terhadap keberhasilan kontestasinya

dalam proses politik seperti pemilihan umum atau pemilihan kepala daerah.

A.Hick dan J.Misra (1993) dalam (Putri & Qodir : 2017) mengatakan modal politik adalah berbagai fokus pemberian kekuasaan/sumber daya untuk merealisasikan hal-hal yang dapat mewujudkan kepentingan meraih kekuasaan. Intinya, modal politik adalah kekuasaan yang dimiliki seseorang, yang kemudian bisa dioperasikan atau berkontribusi terhadap keberhasilan kontestasinya dalam proses politik seperti pemilihan umum.

Foucault (1982) mengungkapkan dalam (Mudoffir :2017), kekuasaan terutama berarti kapasitas untuk melakukan atau menjadi hal-hal tertentu secara paripurna. Kekuasaan dipraktikkan oleh individu atau sekelompok manusia ketika mereka saling berinteraksi. Penggunaan kekuasaan terdapat dalam penetapan aturan apa yang bisa dan tidak bisa dilakukan dalam mengatur hasil yang mungkin muncul. Dalam sistem otoriter, relasi kekuasaan secara progresif tergovernmentalisasi dalam arti semakin delaborasikan, dirasionalisasikan dan dipusatkan dalam bentuk atau dibawah naungan institusi-institusi negara.

2.2. Penelitian Terdahulu

Untuk menghindari anggapan kesamaan dengan penelitian lain yang dilakukan oleh peneliti lainnya, maka dalam kajian pustaka ini penulis mencantumkan hasil-hasil penelitian terdahulu sebagai berikut:

2.2.1. Adnan, Dkk. 2013. Analisis Kemenangan Haryanto-Budiyono Dalam Pemilukada Kabupaten Pati.

Pemilukada Kabupaten Pati yang dilaksanakan pada tahun 2011 dimenangkan oleh pasangan Haryanto-Budiyono. Namun, karena perolehan suaranya belum mencapai lebih dari 30% (tiga puluh persen), kemudian dilanjutkan Pemilihan Putaran kedua. Namun muncul keberatan dari Imam Suroso-Sudjoko. Mahkamah Konstitusi kemudian membatalkan Keputusan KPU Pati tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati, serta memerintahkan untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang.

Meski kembali bersaing dengan 5 pasang calon lain, pasangan Haryanto-Budiyono kembali meraup kemenangan dengan perolehan suara 38,85%. Hal ini cukup menarik karena pasangan Haryanto-Budiyono yang diusung oleh partai-partai kecil mampu mengalahkan pasangan yang diusung oleh PDI-P. Padahal selama 10 tahun Kabupaten Pati menjadi benteng PDI-P.

2.2.2. Abdul Rasyid dan Ratnawati (2010) Modalitas dan Kontestasi Politik (Studi tentang Modalitas dan Strategi Pemenangan Pilkada pada Pasangan Kandidat Drs. H. Yusriansyah Syarkawi, M. Si dan Drs. H. Azhar Bahruddin, M.AP dalam Pilkada 2010).

Secara teoritik ada tiga modalitas yang dimiliki pasangan kandidat yakni modalitas politik, sosial dan ekonomi. Tiga modalitas ini digunakan oleh pasangan Yus-Azhar dalam Pilkada Kabupaten Paser dalam menetapkan strategi kemenangan baik networking,

image building dan mobilisasi. Untuk mengetahui gambaran mengenai peran ketiga modalitas dan strategi pemenangan pilkada pada pasangan Yus-Azhar dalam pilkada Kabupaten Paser, penulis melakukan wawancara sebagai informan yaitu pasangan kandidat, Tim Pemenangan dan relawan Yus-Azhar, dan Pengurus Partai pengusung pasangan kandidat Yus-Azhar, dokumentasi, dan observasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pasangan kandidat Yus-Azhar dalam pilkada Kabupaten Paser menggunakan kekuatan ketiga modalitas dan bersandar pada kekuatan yang dimiliki oleh kandidat, tim pemenangan, elit politik dan tokoh masyarakat, dan orang-orang terdekatnya yang berperan dan memiliki pengaruh untuk mendulang suara lebih banyak. Masing-masing Peran tersebut untuk memperoleh dukungan atau suara dari pemilih dengan networking, image building dan mobilisasi baik itu basis massa dari pilkada 2005 yang pernah diikuti Yusriansyah, basis massa partai pengusung, ormas yang mendukung melalui tokoh-tokoh masyarakat, dan semua strategi yang dijalankan juga oleh tim pemenangan Yus-Azhar dengan dukungan dana politik baik dari pribadi maupun dari donatur baik secara pribadi dan pengusaha lokal.

Kesimpulan yang diperoleh dalam penelitian ini adalah bahwa peran kepemilikan modalitas dalam menetapkan strategi

pemenangan pilkada sebagai satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan atau saling berkaitan satu sama lain baik modalitas politik, sosial dan ekonomi dalam networking, image building dan mobilisasi. Berdasarkan penelitian terdahulu tersebut, bisa dijadikan pelajaran bagi setiap individu dan masyarakat luas bahwa untuk mengikuti pilkada dan strategi pemenangan harus memiliki modalitas politik, sosial dan ekonomi. Kedua, bagi setiap aktor-aktor yang terlibat dalam pemenangan kandidat, baik kandidat itu sendiri, elit politik, tokoh masyarakat, tim pemenangan bahwa networking, image building, dan mobilisasi menjadi penting dilakukan sedini mungkin, bukan hanya terlibat dalam dunia politik praktis.²²

2.2.3. Qadri, Gorbi Mizan (2018) Modalitas Kemenangan M. Husni Djibril Pada Pemilihan Bupati Kabupaten Sumbawa Tahun 2015.

Dalam sejarah kontestasi politik di Kabupaten Sumbawa seperti PemiluKada, belum pernah ada seorang berlatar politisi yang berhasil memenangkan sebuah PemiluKada. Terlebih calon tersebut adalah seorang politisi yang tidak memiliki modal yang besar bersama pasangannya, sedangkan dua lawan politiknya dalam PemiluKada adalah kandidat yang memiliki modal ekonomi yang besar dan ada juga yang mendapatkan dukungan langsung dari petahana. Dimana seorang yang mendapatkan dukungan petahana dianggap memiliki

²² Abdul Rasyid dan Ratnawati. (2010). *Modalitas dan kontestasi politik:: Studi tentang modalitas dan strategi pemenangan Pilkada pada pasangan kandidat Drs. H. Yusriansyah Syarkawi, M. Si dan Drs. H. Azhar Bahruddin, M. AP dalam Pilkada 2010 di Kabupaten Paser Kalimantan Timur* (Doctoral dissertation, Universitas Gadjah Mada).

peluang yang lebih besar dari pada para kandidat lainnya, karena dianggap telah memiliki modal lebih seperti tingkat popularitas dan figuritas. Tetapi hal tersebut masih bisa diminimalisir tergantung bagaimana kekuatan modal yang dimiliki oleh para kandidat.

Seorang kandidat haruslah memiliki akumulasi modal yang lebih sehingga mampu memenangkan sebuah kontestasi (Pierre Bourdieu). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mempelajari bagaimana modalitas yang dimiliki oleh para kandidat dalam penyelenggaraan Pemilu. Studi pada M. Husni Djibril sebagai bupati terpilih di Kabupaten Sumbawa Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2015. Metode dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Teknik pengumpulan data dengan wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menemukan 4 modalitas dominan yang dimiliki oleh Husni Djibril dibandingkan dengan kandidat lainnya, modalitas tersebut adalah modal politik, sosial, ekonomi, dan budaya.

Dari keempat modalitas yang dimiliki oleh M. Husni Djibril tersebut, modal politik dan sosial merupakan modal yang paling dominan. Hal ini membuktikan bahwa Husni Djibril sebagai seorang yang berlatar politisi murni mampu mengakumulasi modal yang dimilikinya, sehingga M. Husni Djibril berhasil memenangkan sebuah

kontestasi politik dan sekaligus berhasil menjadi Bupati berlatar politisi pertama di Kabupaten Sumbawa.²³

2.2.4. Tawakkal Baharuddin dan Titin Purwaningsih (2017). Modalitas Calon Bupati Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Tahun 2015.

Dalam sejarah kontestasi politik di Sulawesi Selatan seperti pemilukada, belum pernah ada seorang perempuan yang berhasil memenangkan sebuah pemilukada. Terlebih calon perempuan tersebut adalah seorang pendatang didaerah pemilihan tersebut, sedangkan lawan politiknya dalam pemilukada adalah seorang petahana. Seorang petahana dianggap memiliki peluang yang lebih besar dari pada para kandidat lainnya, karena dianggap telah memiliki modal lebih seperti tingkat popularitas dan figuritas. Perempuan dalam kontestasi politik tentu juga memiliki peluang yang sama dengan kandidat lainnya, meskipun partisipasi perempuan dalam sebuah kontestasi politik masih saja menjadi isu-isu yang menyudutkan kaum perempuan. Hal tersebut masih bisa diminimalisir tergantung bagaimana kekuatan modalitas yang dimiliki oleh para kandidat, dimana seorang kandidat haruslah memiliki akumulasi modal yang lebih sehingga mampu memenangkan sebuah kontestasi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mempelajari bagaimana modalitas yang dimiliki oleh para kandidat dalam penyelenggaraan pemilukada, studi pada Indah Putri Indriani

²³ Gorbi Mizan Qadri. (2018). Modalitas Kemenangan M. Husni Djibril Pada Pemilihan Bupati Kabupaten Sumbawa Tahun 2015 (*Doctoral Dissertation*, Universitas Brawijaya).

sebagai bupati terpilih di kabupaten Luwu Utara Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015. Metode dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Teknik pengumpulan data dengan wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menemukan 4 modalitas yang dominan dimiliki oleh Indah Putri Indriani dibandingkan dengan kandidat petahana. Modalitas tersebut adalah modal sosial, budaya, politik dan ekonomi. Hal ini membuktikan bahwa Indah Putri Indriani sebagai seorang perempuan dan juga pendatang mampu mengakumulasi modal yang dimilikinya, sehingga berhasil memenangkan sebuah kontestasi politik dan sekaligus berhasil menjadi bupati perempuan pertama di Sulawesi Selatan.

Penelitian terdahulu yang relevan dijadikan sebagai referensi penulis dalam menentukan fokus masalah yang diteliti. Dalam penelitian di atas relevan dengan tema yang ingin diteliti yaitu membahas mengenai analisis kemenangan kandidat dalam sebuah kontestasi politik. Hasil penelitian di atas menunjukkan beberapa kesamaan dari faktor-faktor kemenangan kandidat tersebut di antara karena ada keterlibatan elit dalam memenangkan kandidat, pemanfaatan koalisi partai politik sebagai wadah rekrutmen pemilih yang representatif dan modal yg dimiliki kandidat. Sedangkan yang membedakan adalah objek penelitian serta fokus masing masing peneliti. Sebagaimana penjelasan di atas, ada yang hanya memfokuskan pada kemampuan dari figuritas kandidat saja, dan ada yang fokus pada modal yang dimiliki oleh kandidat saja. Sementara pada

penelitian ini, fokus pada seluruh faktor tersebut diatas yang kemudian penulis menyimpulkan pada 4 faktor pendorong atas kemenangan Tina-Ado yang semuanya merupakan modal Tina-Ado yaitu, Modal Sosial, Modal Ekonomi, Modal Budaya dan Modal Simbolik.

2.3. Kerangka Pemikiran

Dalam penetapan pasangan calon oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamuju, ditetapkan dua pasangan calon yang ikut berkontestasi dalam pemilihan Kepala Daerah. Pasangan Tina-Ado menempati nomor urut satu sedangkan nomor urut dua diisi oleh pasangan *Incumbent* Habsi-Irwan. Pada tanggal 17 Desember 2020, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamuju menetapkan pasangan Tina-Ado memenangkan kontestasi yang tertuang dalam surat nomor 375/PL.02.6-Pu/7602/KPU-Kab/XII/2020.

Terpilihnya pasangan Tina-Ado sebagaimana asumsi dan teori Bourdieu yang telah dijelaskan oleh penulis bahwa, ada 4 modalitas yang dimiliki oleh Tina-Ado yang mana modal tersebut menjadi faktor pendorong atas kemenangan yang diraih dalam Pilkada sebagai arena Politik. Modal tersebut yakni, Modal Sosial, Modal Ekonomi, Modal Budaya dan Modal Simbolik. Empat modal yang menjadi faktor pendorong kemenangan Tina-Ado tersebut kemudian membentuk habitus di masyarakat dan secara tidak langsung mempengaruhi perilaku masyarakat yang ketika masuk dalam arena politik dalam hal ini Pilkada maka masyarakat menjatuhkan pilihannya kepada Tina-Ado. Sebagaimana

pandangan Bourdieu bahwa, tiga unsur yang tidak bisa dipisahkan dan memiliki relevansi dan sinergitas yaitu Modal yang dimiliki kandidat, Habitus yang terbentuk dan menjadi pola perilaku pemilih, dan Arena yang melegitimasi pemanfaatan modal tersebut serta ruang operasionalisasi habitus masyarakat. Sebab itu, hubungan antara Modalitas, Habitus, dan Arena tidak bisa dipisahkan dalam konteks penelitian ini.

Dalam operasionalisasi Modal yang dimiliki oleh kandidat, maka modal yang dimiliki harus mampu menciptakan habitus di masyarakat tentang diri kandidat dengan begitu mempengaruhi pemilih. Sementara, tidak cukup dengan memiliki modal dan mampu menciptakan habitus di masyarakat, modal dan habitus yang tercipta kemudian di operasionalkan dalam ranah politik sehingga iya menjadi bermakna salah satunya adalah Arena Politik Pilkada.

Keterkaitan antara ranah, habitus, dan modal bersifat langsung. Nilai yang diberikan modal dihubungkan dengan berbagai karakteristik sosial dan kultural habitus. Ranah dikitari oleh relasi kekuasaan objektif yang memiliki basis material. Jenis-jenis modal yang dikenali dalam ranah-ranah tertentu dan yang digabungkan ke dalam habitus, sebagian juga dihasilkan oleh basis material tersebut.²⁴

Habitus Menurut Bourdieu dalam Hussain (2013:3) orientasi untuk tingkah laku dan struktur persepsi ini yang memastikan keintelektualan individu dalam dunia sosial adalah sama, aktor ini merasakan dan

²⁴ Haryatmoko. *Menyingkap Kepalsuan Budaya Penguasa: Landasan Teoritis Gerakan Sosial Menurut Pierre Bourdieu*. Dalam majalah BASIS Edisi Khusus Pierre Bourdieu. (Edisi November-Desember 2003), hlm. 23.

berhadapan dengan pengalaman yang tidak sama dalam wujud dan aspek yang berbeda dengan kenyataan yang dihadapi dalam dunia sosial.

Habitus sering digunakan dalam menerangkan norma-norma sosial atau sikap yang diarahkan oleh norma pembentuknya. Proses pembentukan habitus dalam diri aktor dilakukan secara terus-menerus melalui tindakan, pola berpikir, dan mempersepsi dunia sosialnya yang nantinya akan memimpinya dalam menghadapi arena pertarungan yang selalu dihadapinya. Cara kerja habitus dapat membimbing aktor untuk mengenali, menilai, dan merasakan apresiasi yang ditunjukkan oleh dunia sosial karena menjadi cerminan bagi massa pendukungnya. Sebagai kerangka klasifikatif, habitus dapat dapat menghasilkan perbedaan gaya hidup yang kontras dan praktik-praktik kehidupan dalam kehidupan diri aktor.

Kerangka kerja habitus ini diperoleh berdasarkan pengalaman aktor dalam berinteraksi dengan masyarakat ataupun lawan politiknya untuk memperebutkan kursi Pemilu. Pengalaman yang dirasakan aktor diandaikan sebagai sikap, kecenderungan mempersepsi, merasakan, berpikir yang kesemuanya itu sudah terinternalisasi dalam diri berkat pengalaman objektif ataupun subjektif yang dirasakannya. Ranah Bourdieu dalam Fashri (2014:105-106) mendefinisikan ranah sebagai arena kekuatan yang didalamnya terdapat upaya perjuangan untuk memperebutkan sumber daya (modal) dan juga demi memperoleh akses tertentu yang dekat dengan hierarki kekuasaan.

Arena politik di tingkat Daerah Pemilihan dalam hal ini menjadi realitas terjadinya pertarungan antar aktor untuk memperebutkan sumber-sumber modal yang dapat diakumulasikan untuk bisa memiliki kekuasaan politik. Dalam ranah, modal mengambil peranan yang sangat penting, karena penguasaan modal ini akan menentukan posisi seseorang. Semakin besar kekuasaan aktor terhadap modal akan semakin kokoh posisinya dan semakin eksis.

Sesuai dengan pemaparan diatas maka penulis membuat model kerangka pikir sebagai berikut:

Skema Pikir

